



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NO. 030/SKLN-IV/2006  
DAN  
PERKARA 031/PUU-IV/2006**

**PERIHAL  
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA  
ANTARA KPI DENGAN PRESIDEN R.I. c.q. MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMASI  
&  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN  
2002 TENTANG PENYIARAN TERHADAP UUD 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A  
SELASA, 17 APRIL 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NO. 030/SKLN-IV/2006 DAN 031/PUU-IV/2006**

**PERIHAL**

- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KPI dengan Presiden R.I. c.q. Menteri Komunikasi dan Informasi
- Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945

**PEMOHON**

Drs. S. Sinansari Ecip dkk.

**TERMOHON**

Presiden R.I. c.q. Menteri Komunikasi dan Informasi

**ACARA**

Pengucapan Putusan

**Selasa, 17 April 2007 Pukul 13.30 WIB**

**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.         | (Ketua)   |
| 2) Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.        | (Anggota) |
| 3) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.                 | (Anggota) |
| 4) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.        | (Anggota) |
| 5) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.           | (Anggota) |
| 6) Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7) MARUARAR SIAHAAN, S.H.                    | (Anggota) |
| 8) Dr. HARJONO, S.H., M.C.L                  | (Anggota) |
| 9) SOEDARSONO, S.H.                          | (Anggota) |

**Triyono Edy Budhiarto, S.H.  
Cholidin Nasir, S.H.**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**HADIR:**

**Pemohon : (Pengurus KPI 2007-2010)**

- Dr. S. Sinansari Ecip
- Bimo Nugroho Sekundatmo, S.E., M.Si.
- Sasa Juarsa Senjaja, Ph.D.
- Riyanto
- Amar Achmad
- Feti Fadriati
- Don Bosco Salamun
- Izul Muslimin

**Pemerintah :**

- Agnes Widjayanti (Direktur Sistem Informasi-Kominfo)
- Mualimin Abdi, S.H., M.H. (Kabag. Litigasi Dept. Hukum dan HAM)

**DPR-RI : (Tim Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU, Setjen DPR-RI)**

- Agus Srimaeawulan
- Puji Purwanti

**Pihak Terkait : (Indonesia Media Law Policy Centre)**

- Christian Chelsia Chan, S.H., LL.M (Direktur Eksekutif IMPLC)
- Dyan Aryani (Program Manager IMPLC)
- L. Hadi Pranoto (Senior Program Officer)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**

**1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, Saudara-saudara sekalian sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam rangka pembacaan dua putusan sekaligus yang terkait dengan perkara yang diajukan Saudara Pemohon, Komisi Penyiaran Indonesia dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum

**KETUK PALU 3X**

*Asalamu'alaikum wr wb.*

Selamat siang--selamat sore salam sejahtera berarti sudah makan siang semua. Sebelum kita mulai Saudara-saudara seperti biasa saya persilakan dulu siapa saja yang hadir dari semua pihak untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir dalam ruangan ini terutama, silakan mulai dari Pemohon, silakan.

**2. PEMOHON : Dr. S. SINANSARI ECIP**

*Assalamu'alaikum wr wb.*

Kami hadir dalam suasana lebih segar, KPI baru periode 2007-2010 sudah mempunyai kekuatan hukum dengan Surat Keputusan Presiden. Kami hadir sebagian besar ada di sini saya memperkenalkan, sebelah kiri saya Sasa Djuarsa Sendjaja, anggota lama yang terpilih menjadi Ketua KPI baru. Yang kedua Saudara Rianto Ketua KPID Jawa Tengah menjadi anggota KPI pusat yang baru, sebelah kanan saya Saudara Amar Achmad anggota KPI pusat baru, yang berikutnya saudara Feti Fadriati anggota KPI pusat baru, Wakil Ketua KPI pusat yang sebelumnya Saudara Don Bosko Salamun anggota KPI pusat baru, Saudara Izul Muslimin anggota KPI pusat baru, Saudara Bimo Nugroho ada di tempat lain tapi hadir di sini anggota KPI lama yang terpilih kembali, kemudian para asisten dan kepala sekretariat saya sendiri Sinansari Ecip, terima kasih, *assalamu'alaikum wr wb*

**3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Wa'alaikumussalam wr wb.*

Kami ucapkan selamat pada Saudara-saudara yang terpilih baik untuk jabatan kedua maupun yang baru dan juga selamat untuk ketua,

ketua baru dan wakil ketua baru. Selanjutnya sebelah sini silakan Pemerintah.

**4. DPR-RI : RUDI RUSMAZAH (TIM BIRO HUKUM, SETJEN DPR-RI)**

Terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati.

Nama saya Agus Srimarawulan dan sebelah kiri saya Saudari Puji Purwanti dari Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR-RI, terima kasih

**5. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.H (KA.BAG LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)**

*Assalamu'alaikum wr wb*, selamat sore salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muallimin Abdi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terima kasih

**6. PEMERINTAH : AGNES WIDJAYANTI (DIREKTUR SISTEM INFORMASI, DEPT KOMUNIKASI DAN INFORMASI)**

Anggota Majelis yang saya muliakan, saya dari Pemerintah dari Departemen Komunikasi dan Informatika, Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Disminasi Informasi nama saya Agnes Widjayanti Direktur Penyiaran Departemen Kominfo, terima kasih

**7. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Silakan.

**8. PIHAK TERKAIT : CHRISTIAN CHELSIA CHAN, S.H., LL.M. (IMPLC)**

Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.

Terima kasih kami dari Indonesia Media Law Policy Centre dalam dalam hal ini hadir sebagai pihak terkait tidak langsung saat ini saya sendiri Christian Chelsia Chan direktur eksekutif didampingi sebelah kanan saya Diah Aryani, S.H, M.H dan kiri saya Longinus Hadi Pranoto, S.H, terima kasih.

**9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik Saudara-saudara sekalian, baik Pihak Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun Pihak Terkait yang tidak langsung, demikian juga Saudara-saudara para pengunjung dan para pendengar dimana saja berada, karena ini di tayangkan atau disiarkan langsung oleh RRI, mengingat perkara ini sangat berkaitan dengan kepentingan

masyarakat banyak dan banyak sekali warga masyarakat kita yang ingin tahu oleh karena itu disiarkan secara langsung, sekali lagi saya atas nama Mahkamah Konstitusi mengucapkan selamat datang pada Saudara-saudara semua. Putusan ini akan kami bacakan dalam 2 putusan, putusan pertama yang berkaitan dengan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kedua putusan mengenai perkara pengujian undang-undang. Dua-duanya nanti setelah diputuskan sifatnya final dan mengikat dan karena itu semua pihak termasuk Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat termasuk Pemohon sendiri kami harapkan melaksanakannya sebagaimana mestinya menghormati dan melaksanakannya sebagaimana mestinya. Seperti biasa putusan ini panjang, jadi kami akan membaca pertimbangan hukumnya saja saya akan membaca pembukaan, kemudian nanti pertimbangan hukum lalu setelah itu Amar dan Penutupnya begitu juga untuk putusan yang kedua bahkan karena lebih panjang, maka nanti akan dibaca secara bergiliran. saya mulai dengan putusan yang pertama.

**PUTUSAN**  
**Nomor 030/SKLN-IV/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. S. Sinansari Ecip; Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D; Dr. H. Andrik Purwasito, D.E.A; Dr. Ilya Revianti Sunarwinadi; Dr. Ade Armando, MS; Amelia Hezkasari Day, SS; Bimo Nugroho Sekundatmo, SE, M.Si; Drs. Dedi Iskandar Muda, MA; beralamat di Gedung Sekretariat Negara Lantai VI Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta;

Masing-masing Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMOHON;**

**Terhadap**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA** *QQ.* **MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia, Menteri Komunikasi Dan Informatika, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2007;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERMOHON**;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca keterangan Termohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Indonesia Media Law and Policy Centre;

Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Termohon;

Telah membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

#### **10. HAKIM KONSTITUSI : H.ACHMAD ROESTANDI, S.H**

##### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), sebagaimana dimaksud Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK);

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) UU MK, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara

yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengatasnamakan Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut KPI), dan menganggap KPI adalah lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang **diberikan** oleh UUD 1945, dan kewenangan dimaksud, menurut Pemohon telah terganggu atau diambil alih oleh Termohon, yaitu Presiden *qq*. Menteri Komunikasi dan Informatika;

Menimbang bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon masih ditentukan oleh kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam bagian Kedudukan Hukum (*legal standing*) Putusan ini;

## 2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Ayat (1) UU MK, Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 adalah "***lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan***";

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon selaku Anggota KPI, menganggap berhak bertindak untuk dan atas nama KPI;
- bahwa KPI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran) adalah lembaga negara;
- bahwa walaupun KPI tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, akan tetapi secara *derivative* **diberikan** wewenang oleh UUD 1945 melalui Pasal 28F UUD 1945, yang dicantumkan dalam "Konsiderans Mengingat" UU Penyiaran;

Menimbang bahwa Termohon dalam tanggapannya pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan adanya sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD *in casu* di bidang penyiaran, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 61 UU MK, karena tidak terbukti adanya kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon yang



bersumber dari UUD 1945 yang dipersengketakan dengan Termohon;

- bahwa terkait dengan kewenangan regulasi di bidang penyiaran seharusnya dikembalikan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran, yang menyatakan, "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran", akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan UU Penyiaran;
- bahwa sifat independen KPI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2), tidak bisa dilepaskan dari kewenangan KPI berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UU Penyiaran, **yang hanya mencakup kewenangan di bidang konten (isi siaran)**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara Nomor 030/SKLN-IV/2006 perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ini pemeriksaannya dilakukan secara bersamaan dengan perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Penyiaran, maka Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keterangan saksi dan ahli yang terkait dengan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara;

Menimbang bahwa di persidangan Mahkamah telah mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon dan Termohon di bawah sumpah serta membaca keterangan ahli dari Pemohon yang disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah, yang selengkapnya dimuat dalam Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi H. A. Effendy Choirie, M.Ag, M.H.,** telah memberikan keterangan yang tidak menyinggung secara langsung apakah kewenangan KPI diberikan oleh UUD 1945;
2. **Ahli dari Pemohon Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D.,**
  - bahwa UUD 1945 beserta perubahannya memang tidak spesifik menyebut dasar kewenangan pengaturan media penyiaran dan kepada lembaga mana harus dilimpahkan, sedangkan banyak lembaga negara independen yang mempunyai kewenangan mempengaruhi kehidupan bernegara secara substansial ternyata juga dapat dibentuk tanpa mengacu pada UUD dan itu ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;
  - bahwa keterkaitan lembaga negara independen dengan UUD dari segi perspektif komunikasi, dapat dilihat dari rujukan konstitusional komunikasi dimana yang menjadi sumber kewenangan komunikasi termasuk penyiaran, sebenarnya dapat ditelusuri akarnya pada inti UUD 1945 yaitu pada Pembukaan (*preamble*) alinea keempat disebutkan salah satu tujuan pokok pembentukan Negara RI adalah

mencerdaskan kehidupan bangsa dalam negara yang berkedaulatan rakyat;

**3. Ahli dari Pemohon Effendy Ghazali, Ph.D.,**

- bahwa dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 33, untuk menghindari bentrokan antara pemodal dan kepentingan-kepentingan publik melahirkan UU Penyiaran, yang pada ujungnya melahirkan KPI. Dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran mengatakan KPI merupakan lembaga negara bersifat independen dan mengatur hal-hal mengenai penyiaran;

**4. Ahli dari Pemohon Hinca IP Panjaitan, S.H., M.H., ACCS.**

- bahwa sesungguhnya UU Penyiaran lahir dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) walaupun posisinya sejajar sama-sama undang-undang, dalam Pasal 24 UU Telekomunikasi mengatur jelas tentang telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Segala sesuatu yang berkenaan dengan spektrum frekuensinya ada di UU Telekomunikasi. Pasal 4 UU Telekomunikasi mengatur dengan sangat jelas bahwa telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan telekomunikasi mengatur hal-hal mengenai penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam UU Penyiaran hanya pada penetapan kebijakan yang direpresentasikan oleh Pemerintah sedangkan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian diatur oleh lembaga yang independen;
- bahwa spektrum frekuensinya itulah domain dari negara yang direpresentasikan Pemerintah masuk ke dalam Pasal 33 UUD yaitu bumi, langit, dan ruang angkasa. Soal frekuensi, telekomunikasi dalam pelaksanaan sehari-hari selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang dulu berada di bawah Departemen Perhubungan, sekarang berada di sebuah direktorat di bawah Departemen Komunikasi dan Informatika, dan makin bagus;
- bahwa fungsi pengaturan itu jelas pada Pemerintah atau negara untuk menetapkan kebijakan, KPI mengatur alokasi bagaimana mendistribusikan penyiaran. Jadi untuk menjamin demokratisasi, wilayahnya si pengaturan, untuk mengendalikan dan mengawasi adalah wilayahnya KPI sedangkan penetapan kebijakan adalah urusan negara;

5. **Ahli dari Pemohon Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D (Keterangan Tertulis),**

- Sengketa kewenangan konstitusional dapat diklasifikasikan menjadi tiga: (1) kewenangan konstitusional yang secara jelas tekstualnya terdapat dalam UUD 1945, (2) kewenangan implisit yang lahir dari kewenangan pokok, dan (3) kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) untuk menjalankan kewenangan pokok. Mahkamah secara tegas mengatakan, bahwa "**kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang**" (*vide* Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 hal. 90);
- Pemohon mendalilkan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan adalah: (1) **kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran**, dan (2) **kewenangan pembuatan aturan dalam hal penyiaran**. Keduanya memang tidak secara tekstual terdapat dalam UUD 1945. Namun, kedua kewenangan seharusnya dapat diartikan sebagai lahir dari kewenangan negara untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945;

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Pasal 2 Ayat (1) huruf g menentukan bahwa, "*Lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah ... g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945*".

Dari rumusan Pasal 2 Ayat (1) huruf g tersebut, jelaslah bahwa lembaga negara yang bisa bersengketa ke hadapan Mahkamah **tidaklah bersifat limitatif** sehingga masih membuka penafsiran ke arah yang lebih luas;

- Pemohon (KPI), yang kewenangannya diberikan dari UU Penyiaran yang diturunkan oleh UUD 1945, seharusnya diberi kesempatan untuk menjadi pihak dalam sengketa kewenangan konstitusional di hadapan Mahkamah;
- Terlebih, lembaga negara independen semacam KPI, adalah fenomena ketatanegaraan modern yang harus diberikan posisi konstitusional, agar lebih jelas perannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masa depan;

6. **Saksi dari Termohon Jonggi Humala Tua Hamonangan Manalu**, telah memberikan keterangan yang tidak menyinggung secara langsung apakah kewenangan KPI diberikan oleh UUD 1945;

7. **Ahli dari Termohon Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.,**

- bahwa meskipun keberadaan KPI dengan merujuk kepada UU Penyiaran disebutkan sebagai lembaga negara, tetapi kewenangan secara konstitusional sama sekali tidak disebutkan dalam UUD 1945.

Oleh karena itu berkaitan dengan *dispute* ini, maka KPI dalam hal ini tidak memiliki suatu *legal standing* kalau dilihat atau *stressing*-nya dari kewenangan itu, karena dalam Pasal 61 UU MK jelas dengan tegas menyebutkan sepanjang kewenangannya itu diberikan oleh UUD 1945;

- bahwa KPI hadir di sini dengan mengaitkan Pasal 28D UUD 1945 adalah tidak relevan, artinya dia tidak bersinggungan dengan hak konstitusional KPI sebagai institusi, karena secara jelas dan tegas di situ bicara orang perorang, setiap orang, jaminan pengakuan terhadap setiap orang. Kalau mengutip definisi dari hak asasi manusia yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah-Nya;

Terhadap seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa di dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006, Mahkamah telah menentukan *objectum litis* dan *subjectum litis* mengenai kewenangan yang dipersengketakan dan lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 61 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. kewenangan yang dipersengketakan haruslah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. lembaga negara dimaksud adalah lembaga negara yang mempersengketakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sejak Putusan Mahkamah Nomor 004/SKLN-IV/2006;

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut antara lain, *"Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu permohonan sengketa kewenangan lembaga negara harus mempertimbangkan adanya hubungan yang erat antara kewenangan dan lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut. Sehingga, dalam menetapkan apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (**objectum litis**) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kepada lembaga negara tersebut kewenangan itu diberikan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan **legal standing** Pemohon yang akan menentukan berwenang atau*

tidaknya Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan **a quo** ..... Penempatan kata 'sengketa kewenangan' sebelum kata 'lembaga negara' mempunyai arti yang sangat penting, karena hakikatnya yang dimaksud oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 adalah memang 'sengketa kewenangan' atau tentang 'apa yang disengketakan' dan bukan tentang 'siapa yang bersengketa'. Pengertiannya akan menjadi lain apabila perumusan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 itu berbunyi, '... sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar'. Dalam rumusan yang disebut terakhir, hal yang merupakan pokok persoalan adalah pihak yang bersengketa, yaitu lembaga negara, dan tidak menjadi penting tentang objek sengketanya. Sehingga apabila demikian rumusannya, maka konsekuensinya Mahkamah Konstitusi akan menjadi forum penyelesaian sengketa lembaga negara tanpa mempertimbangkan materi yang dipersengketakan oleh lembaga negara, dan hal demikian menurut Mahkamah bukanlah maksud dari Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Karena, apabila dirumuskan "... sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar", Mahkamah Konstitusi akan berwenang untuk memutus sengketa apa pun yang tidak ada sangkut-pautnya sama sekali dengan persoalan konstitusionalitas kewenangan lembaga negara, sepanjang yang bersengketa adalah lembaga negara .....

Menimbang bahwa kata 'lembaga negara' terdapat dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah harus menetapkan lembaga negara mana yang dimaksud oleh Pasal 24C Ayat (1) tersebut. Dalam menetapkan siapa yang dimaksud dengan lembaga negara oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berlandaskan pada uraian di atas bahwa kewenangan Mahkamah adalah untuk memutus sengketa kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan. Karena kewenangan sifatnya terbatas dan untuk sesuatu hal yang tertentu, maka sifat kelembagaan negara tidaklah dapat ditentukan secara umum, tetapi terkait dengan kewenangan yang diberikan atau dengan kata lain sebuah lembaga yang disebut dengan nama apapun berkedudukan sebagai lembaga negara menurut pengertian Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 apabila lembaga tersebut mempermasalahkan atau dipermasalahkan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945 .....

Menimbang bahwa rumusan 'sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar' mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh UUD saja yang menjadi **objectum litis** dari sengketa dan Mahkamah mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian. Ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah tersebut sekaligus membatasi kewenangan Mahkamah, yang artinya apabila ada sengketa kewenangan

*yang tidak mempunyai **objectum litis** 'kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar', maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian itulah yang dimaksud oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah."*

Menimbang bahwa dilihat dari *subjectum litis* dalam permohonan ini, Pemohon adalah KPI dan Termohon adalah Presiden *qq.* Menteri Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal (5), dan Pasal (7) UUD 1945, Presiden *qq.* Menteri Komunikasi dan Informatika adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Termohon merupakan *subjectum litis* dalam perkara *a quo*. Sementara itu, UUD 1945 tidak menyebut, apalagi memberikan kewenangan konstitusional kepada KPI. Dengan demikian, keberadaan KPI bukanlah merupakan lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 61 Ayat (1) UU MK;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan, kewenangan konstitusional Pemohon mengalir secara *derivative* dari Pasal 28F UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:  
Bahwa Pasal 28F UUD 1945, berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*";

Pasal 28F UUD 1945 tersebut, mengatur tentang **hak setiap orang** untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, dan bukan mengatur hak dan/atau kewenangan lembaga negara, apalagi memberikan kewenangan kepada lembaga negara yang berkaitan dengan penyiaran;

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa KPI adalah lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya diberikan oleh undang-undang bukan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, karena KPI bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, maka KPI tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan Pasal 61 Ayat (1) UUMK untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa KPI sebagai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan oleh karenanya Pokok Permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

**11. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQI, S.H**

Sebelum Diteruskan Untuk kesempurnaan Bukti Halaman 66 lima Ahli dari pemohon Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D harus ditambah (Keterangan Tertulis) cukup kembali ke halaman 71 saya ulangi sedikit Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa KPI sebagai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan oleh karenanya Pokok Permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengingat Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

**MENGADILI:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal 16 April 2007, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 17 April 2007, yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Achmad Roestand, Maruarar Siahaan, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, H. Abdul Mukthie Fadjar, H. Harjono, I Dewa Gede Palguna, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Tidak Langsung Indonesia Media Law and Policy Centre.

Demikian ditandatangani oleh sembilan hakim konstitusi dan panitera pengganti dan dengan demikian putusan ini resmi telah dibacakan atau diucapkan.

Selanjutnya putusan yang kedua

**PUTUSAN**

**Nomor 031/PUU-IV/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. S. Sinansari Ecip; Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D; Dr. Andrik Purwasito, DEA; Dr. Ilya Revianti Sunarwinadi; Dr. Ade Armando; Amelia Hezkasari Day, SS; Bimo Nugroho Sekundatmo, SE, M.Si; Drs. Dedi Iskandar Muda, MA, kesemuanya Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, bertempat di Gedung Sekretariat Negara Lantai VI, Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Pemerintah;

Telah membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Tidak Langsung Indonesia Media Law and Policy Centre;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan dalam sidang terdahulu langsung ke pertimbangan hukum.

**12. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam perkara ini akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Pokok permohonan yakni menyangkut konstitusionalitas ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Menimbang bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



## **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yang dimuat kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2003 Nomor 98, TLN RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) Mahkamah berwenang antara lain untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (LN RI Tahun 2002 Nomor 139, TLN RI Nomor 4252, selanjutnya disebut UU Penyiaran), sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa DPR RI, dalam keterangan tertulisnya tanggal 22 Februari 2007, telah menyatakan ketentuan Pasal 42 Ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 bertentangan dengan Pasal 60 UU MK, dan dengan aturan yang demikian MK telah menganulir ketentuan Pasal 60 UU MK, dan MK telah memperluas kewenangannya dalam menguji materiil Undang-Undang melalui Pasal 42 Ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tersebut, dan ketentuan PMK tersebut bukan merupakan ketentuan hukum acara.

Menimbang bahwa terlepas dari keberatan DPR tentang PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang diperbolehkannya mengajukan pengujian materi muatan, ayat dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji Mahkamah sepanjang terdapat alasan atau syarat konstitusionalitas yang berbeda, yang menurut DPR bertentangan dengan Pasal 60 UU MK, akan tetapi yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan pengujian Pemohon bukan hanya menyangkut Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2), melainkan juga meliputi Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran, maka karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, keberatan DPR akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Menimbang bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK beserta penjelasannya telah menentukan tentang Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warganegara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Menimbang bahwa dengan demikian, agar suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka pihak yang dimaksud harus menjelaskan:

- 1. kualifikasinya dalam permohonan, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara;
- 2. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya, menentukan lima syarat adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU MK sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang ;
- c. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian ;
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa Pemohon sebanyak delapan orang anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 267/M Tahun 2003, yang menyatakan bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, untuk dan atas nama KPI. Dengan demikian, kedelapan Pemohon dimaksud mengkualifikasikan diri sebagai lembaga negara dengan mendasarkan diri pada Pasal 1 Angka 13 UU Penyiaran yang menentukan, "*Komisi Penyiaran adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada dipusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran*";

Menimbang bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 bertanggal 28 Juli 2004, Mahkamah telah

menetapkan bahwa istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 yang keberadaannya atas perintah konstitusi, tetapi ada juga lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan Mahkamah berpendapat bahwa KPI adalah lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya diberikan oleh undang-undang, *in casu* UU Penyiaran. Pendapat Mahkamah demikian telah dikemukakan dalam putusan Mahkamah tersebut di atas;

Menimbang bahwa karena kualifikasi Pemohon adalah sebagai lembaga negara, maka sesuai dengan bunyi Pasal 51 Ayat (1) UU MK, kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, merupakan syarat untuk menjadi dasar *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 1 Angka 13 serta Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran, KPI yang ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, menjadi tidak dapat independen jika pengaturan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran, sehingga menurut Pemohon UU tersebut merugikan kewenangan konstitusional Pemohon. Demikian juga "**hal-hal mengenai penyiaran**" meliputi seluruh persoalan penyiaran, termasuk pemberian izin, sebagai buah semangat reformasi harus berada pada masyarakat sendiri, sehingga oleh karenanya izin penyiaran dirumuskan dalam frasa "**Negara melalui KPI**" yang diartikan menjadi izin diberikan oleh Pemerintah, oleh Pemohon dipandang merugikan kewenangan konstitusionalnya, karena hal demikian tidak sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada unsur-unsur tentang syarat mengenai kedudukan hukum atau *legal standing*, anggapan Pemohon bahwa UU Penyiaran khususnya Pasal 62 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 Ayat (5) merugikan kewenangan konstitusionalnya, baik tentang hubungan kausal (*causal verband*), sifat kerugian yang spesifik, dan kemungkinan bahwa kerugian tidak akan terjadi lagi jika permohonan dikabulkan, Mahkamah berpendapat kerugian yang timbul terhadap wewenang konstitusional Pemohon akibat berlakunya UU Penyiaran akan ditentukan secara tegas dengan mempertimbangkannya bersama-sama dengan substansi atau Pokok Permohonan, sehingga oleh karenanya Mahkamah akan mengambil sikap tentang ada tidaknya *legal standing* Pemohon tersebut pada bagian pertimbangan Pokok Permohonan;

Sementara itu dua orang Hakim Konstitusi berpendapat berbeda, dengan pendirian tegas bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan

hukum atau *legal standing*, karena berdasarkan pendirian MK dalam perkara Nomor 030/SKLN-IV/2006 telah dinyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh KPI bukan merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga *mutatis mutandis* dalam masalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, KPI juga tidak memiliki kewenangan konstitusional, dan oleh karenanya tidak ada kerugian konstitusional yang diderita oleh KPI sebagai akibat berlakunya UU Penyiaran. Dengan pendirian demikian, dua Hakim Konstitusi tersebut berpendapat bahwa tanpa memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah dapat segera menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan *a quo*, namun oleh karena kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terkait dengan Pokok Permohonan maka penentuan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan di bawah ini.

### **3. POKOK PERMOHONAN**

Menimbang dalam Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 62 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran, bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, dengan uraian argumen Pemohon sebagai berikut:

#### **a. Pasal 62 Ayat (1) dan (2)**

Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran, menegaskan bahwa KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran, akan tetapi Pasal 62 Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa aturan-aturan penyiaran dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Satu lembaga negara tidak dapat independen jika pengaturan kewenangannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah, karena akan membuka peluang besar intervensi Pemerintah yang menurut UUD 1945 memonopoli kewenangan konstitusional pembuatan Peraturan Pemerintah. Untuk menjamin independensi KPI sebagai *independent agency* KPI diberikan hak mengatur sendiri kewenangannya, hal mana sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran di atas dan sesuai pula dengan doktrin bahwa lembaga negara independen adalah merupakan *self regulatory body*. Jika rincian kewenangan KPI dimonopoli pengaturannya oleh Peraturan Pemerintah, maka KPI akan cenderung menjelma menjadi *executive agency*. Lembaga negara independen adalah organ negara (*state-organ*) yang didesain independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan sesuai pendapat Funk dan Seamon, lembaga negara independen sering mempunyai kekuasaan "*quasi legislative, executive power dan quasi judicial*". Meskipun yang bertentangan adalah aturan dalam Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran, tetapi Pasal 1 Angka 13

dan Pasal 7 Ayat (2) tidak dimintakan pengujian karena MK telah memutuskan bahwa aturan KPI sebagai Lembaga Negara tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi Pasal 62 Ayat (1) dan (2) nyata-nyata menghalangi Pemohon dalam melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga negara independen, dan pengaturan kewenangan Pemohon tentang penyiaran tidak sejalan dengan konsep lembaga negara independen yang sudah diakui MK, sehingga hal demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

#### **b. Pasal 33 Ayat (5)**

Frase "**oleh negara**" dalam Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, karena dalam praktik frasa "**oleh negara**" diartikan Pemerintah khususnya Depkominfo, padahal jika betul demikian frasanya harus tegas menyatakan "diberikan oleh **Pemerintah** melalui KPI", sesuai dengan definisi Pasal 1 butir 12 bahwa "Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur".

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa P-1 sampai dengan P-6, serta seorang saksi dan tiga orang ahli, yang masing-masing keterangannya secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, tetapi pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

### **13. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. LAICA MARZUKI, S.H.**

#### **1. Saksi Drs. H.A. Effendy Choirie M.Ag., M.H.**

- UU Penyiaran merupakan amanat reformasi untuk mengganti UU Penyiaran sebelumnya yang dianggap tidak demokratis. Dalam UU ini ada beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian semua pihak, *pertama, tuntutan demokrasi, kedua, tuntutan deregulasi*, agar gelombang frekuensi sebagai ranah publik yang terbatas tidak dikuasai orang-orang tertentu saja tetapi dibagi secara adil di seluruh wilayah Indonesia.
- Ranah publik yang terbatas ini perlu diatur oleh satu badan tertentu yang kita sebut Komisi Penyiaran Indonesia, dengan menentukan landasan filosofis dan sosiologis dan meskipun tidak disebut secara langsung tetapi semangat Pasal 33 UUD 1945 ada di sana.
- Oleh karena adanya pendapat agar tidak semua diurus oleh komisi penyiaran, karena baru memulai demokrasi, maka rumusan pengaturan dituangkan dalam pasal-pasal "KPI bersama Pemerintah", bukan "Pemerintah bersama KPI", termasuk dalam soal Peraturan Pemerintah, yang sebelumnya merupakan

kompromi, tetapi kemauan kita waktu itu semuanya dibuat KPI bukan Pemerintah, karena bandul demokrasi atau reformasi semua adalah KPI bukan Pemerintah lagi;

- Semangat yang ada di DPR saat itu menginginkan pengaturan substansi dimaksud dilakukan KPI dengan mengajak serta Pemerintah untuk menyusun Peraturan Pemerintah, tetapi *leading sectornya* adalah KPI, baru kemudian diserahkan kepada Presiden. Hal dimaksud merupakan kesepakatan bersama. Namun, penafsiran undang-undang itu menurut saksi bukan hanya terpaku secara gramatikal saja, tetapi penafsiran secara historis, filosofis, dan teleologis juga penting;
- Pernyataan Pemerintah bahwa KPI hanya mengurus *content* sama sekali tidak benar, tetapi KPI sebagai lembaga negara yang mengatur mengenai penyiaran adalah menyangkut soal dari A sampai Z, kecuali mengenai izin frekuensi.

## 2. Ahli Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D.

- Penyiaran adalah media komunikasi yang sangat penting yang pada saat ini satu-satunya media yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah negara kita, sekaligus dan serentak. Penyiaran mempunyai potensi menggalang pendapat serta mendorong tindakan bersama, adakalanya secara spontan, sehingga dalam kepustakaan komunikasi dikenal juga penyiaran itu sebagai *hot media*, media panas dan yang memanaskan secara spontan dengan akibat langsung. Karena itu wajar apabila media seperti itu menjadi ajang rebutan dari berbagai pihak yang ingin mendominasi kekuasaan masyarakat untuk berbagai kepentingan apakah politik, ekonomi, usaha, keyakinan kelompok atau diri sendiri.
- Oleh karena itu dibanyak negara penyiaran itu diatur oleh satu lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional yang kuat supaya ia bekerja independen, terlepas dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung. Yang menjadi sumber acuan lembaga tersebut hendaknya semata-mata kepentingan orang banyak dan kepentingan hidup bersama. Daftar dari negara-negara yang beralih dari pengaturan oleh Pemerintah kepada lembaga negara yang independen semakin panjang, malah kebanyakan negara bekas komunis pindah ke lembaga independen tersebut.
- Sumber kerancuan kewenangan yang lain yang pernah disebut adalah Pasal 33 UUD 1945, di mana penyiaran memakai media fisik frekuensi yang sebetulnya merupakan sumber alam milik bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Penyiaran sering disamakan dengan pers, padahal media pers kehidupannya

menggunakan sumber atau *resource* milik pribadi atau milik perusahaan, tetapi penyiaran memakai milik bersama seluruh masyarakat. Memang sumber daya alam frekuensi tidak dapat disamakan dengan sumber alam lainnya yang dapat dieksploitasi sebagai produk fisik, tetapi memerlukan usaha yang lebih besar dan lebih luas, tidak hanya *content* tetapi seluruh penyelenggaraan, karena jika hanya *content*, kita sebetulnya kembali pada konsep pengaturan penyiaran lama. Undang-undang ini hemat kami maksudnya demokratisasi komunikasi.

- Di Amerika Serikat, khusus mencakup penyiaran, badan regulasinya adalah *Federal communication commission*, komisi penyiaran federal yang mengatur penyelenggaraan penyiaran. Meskipun berada di luar Pemerintahan, jangkauannya sangat luas, bukan hanya masalah izin stasiun penyiaran tetapi sampai kepada masalah pengaturan standarisasi teknologi penghantaran frekuensi.

### **3. Ahli Effendy Ghazali Ph.D.**

- Menurut Prof. Dennis McQual apa yang kita ributkan sekarang dan sudah berlangsung lama dapat dikelompokkan pada tiga hal, yaitu kepentingan pemodal, kepentingan publik dan kepentingan Pemerintah;
- Asumsi yang pertama adalah pemodal takut pada kepentingan publik dalam ranah penyiaran akan berupaya untuk berlingung dibalik "ketiak Pemerintah". Asumsi yang kedua, Pemerintah yang ragu-ragu atau tidak sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan publik akan lebih memilih berpihak kepada pemodal, dan asumsi yang ketiga publik dipaksa bertekuk lutut di bawah kepentingan pemodal dalam konteks industri penyiaran;
- UU Penyiaran dulu lahir sebagai kompromi dalam khasanah politik komunikasi di mana dibelakangnya ada kepentingan-kepentingan pemodal, sebagaimana juga terjadi diberbagai negara di dunia. Pertanyaannya kenapa kita tidak kembali saja kepada semangat UU Penyiaran dengan mengembalikan kewenangan terutama *leading sectornya* kepada KPI. Kalau tidak, maka reformasi kita bergulir bukannya ke arah yang lazim berlaku di banyak negara lain, tetapi kita kembali kepada paradigma yang mundur kebelakang di mana hal-hal mengenai penyiaran kita serahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika berserta jajarannya;

### **4. Ahli Hinca Panjaitan, S.H., M.H., ACCS.**

- UU Penyiaran sungguh-sungguh mengadopsi pemikiran adanya lembaga yang independen mengatur penyiaran untuk

menggantikan peran Pemerintah yang melakukan kontrol super ketat. Hal ini kemudian menjadi materi dan norma hukumnya sebagai tampak jelas dan mudah dibaca mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 7. Rumusan Pasal 6 dan Pasal 7 mengartikan bahwa Pemerintah sama sekali tidak lagi mengurus hal-hal mengenai penyiaran termasuk kata “hal-hal mengenai penyiaran” justru menggambarkan keseluruhan yang berkenaan dengan penyiaran. Sebab, memang spiritnya adalah mengakhiri dominasi Pemerintah mengatur penyiaran secara total selama ini;

- Fungsi penetapan kebijakan tentang alokasi spektrum frekuensi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, di mana negara (baca: Pemerintah) yang direpresentasikan oleh Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang saat ini berada di bawah Departemen Komunikasi dan Informatika. Sedangkan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian ada di tangan Komisi Penyiaran Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada posisi pengaturan tentang perizinan. Rapat Forum Bersama antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Pemerintah (baca: Dirjen Pos dan Telekomunikasi) secara tegas diadakan untuk memastikan apakah alokasi frekuensi yang akan diberikan kepada lembaga penyiaran sudah sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ditetapkan negara;
- Dengan demikian pemahaman makna “izin diberikan oleh Negara melalui KPI” dalam Pasal 33 Ayat (4) adalah pemaknaan izin diberikan oleh KPI bukan oleh Pemerintah. Peran Pemerintah hanyalah memastikan bahwa alokasi frekuensi yang akan diberikan kepada pemohon atau lembaga penyiaran sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam regulasi telekomunikasi. Izin yang diberikan oleh KPI setelah selesai melakukan Rapat Forum Bersama disebut Izin Penyelenggaraan Penyiaran sedangkan alokasi frekuensi yang diberikan lembaga penyiaran akan diberikan Izin Stasiun Radio berupa *call sign* (tanda penanda) sesuai regulasi telekomunikasi internasional. Dengan demikian tidak ada keraguan sedikit pun bahwa sesungguhnya “izin diberikan oleh negara melalui KPI” mempunyai arti yang sangat jelas ...“izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh KPI”;

#### **14. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H**

##### **5. Ahli Denny Indrayana, SH., LL.M., PH.D (Keterangan Tertulis)**

- Banyak pendapat ahli yang menyatakan bahwa kriteria independensi suatu lembaga, di antaranya, bila dinyatakan secara



tegas dalam undang-undang komisi yang bersangkutan, atau bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan pemberhentian sang pimpinan komisi (William J. Fox); sifat independen berkait erat dengan pemberhentian anggota yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi (Michael R. Asimov); sifat independen tercermin dari: (1) Kepemimpinan yang kolektif, (2) kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu, dan (3) masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*);

- Ciri lain dari lembaga negara independen adalah berwenang mengeluarkan peraturan tersendiri yang berkait dengan tugasnya (*self-regulatory agency*). Hal mana bersesuaian dengan Pasal 7 Ayat (2) UU 32 Tahun 2002 yang mengatur "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran". Untuk menjamin independensi KPI seharusnya masalah penyiaran diatur dalam produk hukum undang-undang yang diturunkan lebih lanjut ke dalam Peraturan KPI;
- Pengaturan lebih lanjut ketentuan penyiaran dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU 32 Tahun 2002, berpotensi mengganggu independensi KPI. Pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, menyebabkan KPI lebih tepat diklassifikasikan sebagai *executive agency* bukan *independent agency*;
- Tentang Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran, untuk menjamin kepastian hukum sebaiknya memang ditegaskan bahwa pemberian izin melalui KPI. Di lapangan Menkominfo mengartikan secara sepihak "Negara sebagai Pemerintah". Padahal makna "Pemerintah" sudah diartikan tersendiri dalam Pasal 1 butir 12 UU Penyiaran, jadi makna "negara" dalam Pasal 33 Ayat (5) harus diartikan diluar Pemerintah yang telah mempunyai makna khusus berdasar UU Penyiaran;

Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan tertulis yang dibacakan dipersidangan tanggal 19 Februari 2007, beserta keterangan lisan dan tanggapan-tanggapan, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

- Keberadaan Pasal 33 Ayat (5) dalam UU Penyiaran, masuk dalam bagian kesebelas dalam sub judul perizinan, ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 33 Ayat (8) serta Pasal 62 Ayat (1) dan (2), dengan demikian walaupun tidak dimohonkan secara tersendiri pada permohonan yang lalu, tetapi diakui oleh

Pemohon sebagai bagian tak terpisahkan yang pernah dimohonkan untuk diuji.

- Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran, pada pokoknya menyatakan berdasarkan kesepakatan [ini menunjuk kepada ketentuan pada Ayat (4)], secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI. Pasal 33 Ayat (8) UU Penyiaran menentukan “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh Pemerintah”, dan ketentuan Pasal 33 Ayat (8) UU Penyiaran merupakan ketentuan yang termasuk dalam Pasal 62 Ayat (1) UU Penyiaran yang mengalami perubahan sebagai akibat diajukannya permohonan pengujian.

Dengan demikian materi muatan Pasal 33 Ayat (5) merupakan satu kesatuan baik dengan Pasal 33 Ayat (8) dan dengan Pasal 62 Ayat (1). Karena itu menurut Pemerintah permohonan Pemohon tidak dapat dipisahkan serta merta atau berdiri sendiri terhadap Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran.

Selanjutnya, berkaitan dengan argumentasi yang menghubungkan permohonan ini dengan ketentuan Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan adanya kemungkinan pengujian kembali terhadap muatan ayat, dan atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat syarat-syarat konstitusionalitas yang berbeda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

- Bahwa Pasal 8 UU Penyiaran, dinyatakan secara tegas bahwa kewenangan Pemohon meliputi kewenangan di bidang konten (isi siaran) dan tidak mencakup kewenangan di bidang perizinan.
- Bahwa kewenangan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) sampai dengan (3) UU Penyiaran, sudah sangat jelas menunjukkan adanya keselarasan fungsi dan peran Pemohon sebagai wujud peran serta masyarakat.

Lebih lanjut kewenangan Pemohon ditegaskan juga dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (2) huruf c UU Penyiaran, yaitu hanya terbatas pada kewenangan pengawasan berdasarkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh KPI dalam bentuk penjabaran Pasal 8 Ayat (2) huruf a sampai d UU Penyiaran, yang mencakup hanya pengaturan di bidang konten (isi siaran) penyiaran.

Karena itu, seyogyanya kewenangan regulasi di bidang penyiaran dikembalikan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran, akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan UU Penyiaran (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 005/PUU-I/2003).

Bahwa sifat independen pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2), tidak bisa dilepaskan dari kewenangan Pemohon berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UU Penyiaran, yang hanya mencakup kewenangan di bidang konten (isi siaran) sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Demikian halnya dengan kedudukan hukum dari Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran, yang menyatakan "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur mengenai hal-hal penyiaran", harus diartikan dalam perannya sebagai lembaga negara yang netral dengan tugas mengatur hal-hal mengenai penyiaran dalam perannya pada pemberdayaan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial dan partisipasinya untuk memajukan penyiaran nasional, dengan cara menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik dalam penyiaran itu sendiri;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemerintah juga mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-4, serta seorang saksi dan seorang ahli, yang keterangannya masing-masing secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menerangkan hal berikut:

#### **1. Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.**

- Peraturan Pemerintah adalah wewenang penuh Pemerintah, tidak ada intervensi dari DPR, karena terjadi delegasi dari Pembentuk undang-undang kepada Pemerintah, bahwa kemudian dikhawatirkan terjadi delegasi blanko, telah dibangun satu sistem pranata *judicial review* kalau memang ada pihak yang keberatan terhadap PP yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan Pemerintah dilihat dari fungsi legislasi harus dikaitkan dengan Pasal 5 Ayat (2) dalam sistem perundang-undangan Indonesia untuk mem *breakdown* suatu undang-undang melalui PP sebagai perintah konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tidak mengenal apa yang disebut Peraturan KPI, secara eksplisit yang disebutkan yang tertinggi adalah UUD 1945 dan seterusnya sampai dengan Perda. Karena itu dalam kerangka sistem perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Konstitusi adalah tepat kalau Pemerintah mengeluarkan PP, bahwa kemudian substansi PP tidak disetujui itu soal lain.

- Pemerintah mempunyai fungsi administrasi, karena dalam diri Presiden melekat jabatan sebagai administratur negara yang tertinggi, yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin, kewenangan mana kemudian secara derivatif diberikan kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan penyiaran.
- Klausul yang ada dalam Bab HAM maksudnya adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap orang perorang bukan untuk institusi. Bahwa kemudian KPI mengaitkan salah satu pasal yang ada dalam Pasal 28D UUD 1945 itu, menurut ahli tidak relevan artinya tidak bersinggungan dengan hak konstitusionalnya sebagai institusi. Mengutip definisi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dilindungi dan ditegakkan oleh Negara, Pemerintah, hukum dan orang perorang. Berbicara tentang hak asasi manusia dalam konstitusi maka itu merupakan kewajiban utama Pemerintah, bukan domain KPI semata.
- Dengan berpegang kepada sistem ketatanegaran kita, maka menyangkut UU Penyiaran, baik untuk mengeluarkan peraturan maupun yang berkenaan dengan izin, itu tetap kewenangan Pemerintah, dan kalau KPI tidak sepakat dengan substansi PP, ada mekanisme *judicial review*.

## 2. Saksi Jonggi Humala Tua Manalu

- Saksi kebetulan adalah pengurus PRSSNI, sehingga secara organisatoris saksi terlibat dengan *constitutional review*, dan ketika itu kami *complain* atau keberatan adanya sebuah lembaga yang memegang tiga kekuasaan sekaligus, karena khawatir ini akan menjadi lebih hebat dari institusi Deppen yang dulu. Dulu masih melibatkan lembaga-lembaga lain, kalau ini berada disatu institusi, baik pemberian izin, sekaligus mengeksekusi, sehingga timbul pertanyaan siapa yang mengontrol dan tidak ada perimbangan;
- Yang menjadi korban sebenarnya adalah lembaga penyiaran, dan pemahaman kami reformasi itu adalah perbaikan dari apa yang kurang baik di masa-masa sebelumnya. Kalau dimasa lalu izin biasanya bulan Maret, dan kalau ada soal administratif mungkin keluaranya bulan Juni. Tetapi sekarang pada bulan November 2006, seribu delapan ratus kurang lebih radio, tujuh puluh televisi lokal, sepuluh televisi nasional itu illegal. Saksi pikir kenapa reformasi makin panjang urusan, dan semua terhenti. Karenanya saksi menghimbau sebagai korban dari industri penyiaran baik

radio maupun TV, agar sengketa ini dihentikan, karena Republik ini jadi cawut-mawut.

### **HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

Menimbang bahwa Tim Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah juga memberikan keterangan tertulis yang dibacakan di depan persidangan Mahkamah tertanggal 8 Maret 2007, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

- Pasal 62 Ayat (1) dan (2) yang dimohonkan diuji karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. Menurut Pemohon, pengaturan penyiaran dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah akan menyebabkan KPI sulit menjadi lembaga negara yang bersifat independen sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran, menyebabkan masalah penyiaran regulasinya akan berada di bawah kepentingan eksekutif, yang sedikit banyak akan mempengaruhi independensi KPI.
- Menurut Pemohon frasa "oleh Negara" dalam Pasal 33 Ayat (5) menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, karena dalam praktik frasa "oleh Negara" diartikan "oleh Pemerintah", khususnya Depkminfo. Padahal jika betul yang dimaksud Negara itu adalah Pemerintah, Pemohon berpendapat frasanya harus tegas menyatakan, "diberikan oleh Pemerintah melalui KPI". Ketegasan demikian akan konsisten dengan definisi Pasal 1 Angka 12 UU Penyiaran.
- Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Juli 2004 dengan Nomor Perkara 005/PUU-I/2003, sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK tidak boleh lagi diuji oleh Mahkamah Konstitusi.
- Pengaturan penyiaran dengan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran yang menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, adalah pandangan yang keliru, oleh karena pengaturan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 62 Ayat (1) dan (2) tersebut sudah benar menurut Pasal 5 Ayat (2) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- Kewenangan yang diberikan kepada KPI untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran tercermin dalam Pasal 14 Ayat (10), Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (4), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 33 Ayat (8), Pasal 55 Ayat (3) dan Pasal 60 Ayat (3) UU Penyiaran, yang mana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut memberikan peran dan kewenangan KPI bersama-sama Pemerintah untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Keterlibatan KPI bersama dengan pemerintah dalam penyusunan Peraturan Pemerintah merupakan hasil kompromi politik dan di sini KPI mendapat tempat yang cukup dominan untuk menyusun Peraturan Pemerintah.
- Kewenangan KPI yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2), artinya harus dibaca menjadi satu kesatuan. Pasal 7 Ayat (2) memberi kewenangan dan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) menentukan kewenangan tersebut dilakukan bersama dengan Pemerintah.
- Undang-Undang Bank Indonesia secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia, sedangkan pada UU Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Dengan demikian jelas perbedaan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada lembaga negara yang bersifat independen. Dengan argumentasi yuridis yang demikian, maka Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
- Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa frasa "oleh Negara" dalam Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran yang diartikan sebagai frasa "oleh Pemerintah", tidak ada relevansinya dengan kepastian hukum, karena kepastian hukum dapat diartikan sebagai adanya perlindungan hukum oleh Undang-Undang yang diejawantahkan dalam tindakan penegakan hukum. Dalam Hukum Tata Negara ada teori bahwa negara itu diartikan dalam keadaan statis, sedangkan Pemerintah dalam keadaan dinamis, artinya negara merupakan organisasinya, dan Pemerintah merupakan organ negara yang menyelenggarakan Pemerintahan. Bahwa Pemerintah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan negara dapat dilihat dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UUD 1945;

Menimbang bahwa keterangan Tim Kuasa Hukum DPR RI tersebut ternyata telah bertentangan dengan Keterangan yang

diberikan oleh Anggota DPR RI dari Komisi I, yang secara lisan telah menerangkan hal-hal berikut:

- Lahirnya KPI merupakan perwujudan demokratisasi yang demikian pesat yang menjadi tuntutan masyarakat. KPI merupakan lembaga masyarakat yang berfungsi *checks and balances*, dengan demikian, maka sebagian peran Pemerintah itu didistribusikan kepada masyarakat. Dalam hal ini KPI sebagai lembaga independen dan berfungsi untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran, maka seyogianya dia diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran. Tetapi masalah terjadi ketika Pemerintah atas dasar tafsir hukumnya membuat peraturan-peraturan yang melahirkan *contradictio in terminis* dengan pasal-pasal UU Penyiaran.
- Karena itu posisi DPR khususnya Komisi I senantiasa, dalam rapat-rapat dengan Depkominfo, berada pada posisi mengamankan undang-undang dan dalam kaitan ini **bersama-sama dengan pemohon** untuk menegakkan undang-undang yang menjadi *dispute* dari sudut hukum. Karena itu, Komisi I menolak lima PP Penyiaran.
- Kalau KPI menyatakan bahwa izin itu harusnya diberikan KPI karena arti negara adalah KPI dalam hal ini sebagai lembaga negara independen, dan Pemerintah menafsirkan Pemerintah sendiri, maka dua-duanya ada rujukan sendiri, tetapi tafsir ini melahirkan ketidakpastian kepada KPI sendiri.
- DPR pernah menganjurkan untuk melakukan kompromi politik dengan tanda tangan bersama antara Pemerintah dan KPI, mengingat klaim masing-masing ada dasar hukumnya. Sebenarnya kalau tafsir tentang peraturan itu dibuat oleh Pemerintah bersama dengan KPI atau KPI bersama dengan Pemerintah, kalau kedua belah pihak memiliki empati yang sama tentang posisi pernyataan itu, semestinya PP yang keluar itu bisa diakui, dipahami dan disetujui kedua belah pihak. Persoalannya ternyata tidak, karena ada pihak yang melakukan langkah yang terlalu jauh bahwa itu merupakan kewenangan sendiri, sehingga terjadilah perseteruan ini, dan sampai sekarang ternyata anjuran atau usulan dari komisi I untuk melakukan kompromi dengan tanda tangan bersama belum juga bisa dilakukan.

Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung, yaitu Indonesia Media Law & Policy Centre (IMLPC), berdasarkan dokumen risalah sidang dari Sekretariat Komisi I DPR RI, telah memberikan keterangan Addinformandum, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

- Bahwa sejak awal pihak terkait telah menemukan bahwa draft usul inisiatif atas RUU tentang Penyiaran sudah menyebutkan Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga regulasi penyiaran yang bersifat independen;
- Bahwa "Badan Pengatur Penyiaran (*Broadcasting Regulatory Body*), pada dasarnya adalah lembaga negara yang oleh hukum dilimpahi wewenang atas nama negara, untuk melaksanakan seluruh ketentuan Undang-Undang Penyiaran, disertai penegasan bahwa sejak awal para pengusul inisiatif RUU mengingatkan bahwa kehadiran UU Penyiaran baru dimaksudkan untuk mengantisipasi kerancuan atas ketidakpastian hukum di bidang penyiaran yang di masa lalu terjadi dengan beragam peraturan pelaksana.
- Bahwa dari tanggapan Fraksi TNI/Polri, Fraksi Partai Demokrat Kasih Bangsa, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, pada umumnya menekankan perlunya satu lembaga independen yang menangani penyiaran, yang dikelola oleh *Civil Society* dan tidak lagi didominasi oleh Pemerintah;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh keterangan Pemerintah, DPR, Saksi, Ahli, dan Pihak Terkait, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Oleh karena telah adanya Putusan Mahkamah terdahulu dalam Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 berkenaan dengan pengujian pasal yang sama dari undang-undang *a quo*, apakah substansi putusan Mahkamah tersebut berbeda dengan perkara yang dimohonkan pengujian;
- Bagaimanakah seharusnya penafsiran dilakukan terhadap suatu ketentuan undang-undang;
- Apakah pengujian atas Pasal 62 Ayat (1) dan (2) maupun Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran yang dimohonkan Pemohon dapat dianggap merugikan kewenangan Pemohon, menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, padahal Pemohon dibentuk dan lahir dengan diundangkannya UU Penyiaran;
- Jikalau KPI tidak menerima bahwa pelaksanaan wewenang mengeluarkan izin Penyiaran dilakukan Pemerintah sebagai interpretasi atas frasa "*oleh Negara melalui KPI*", maka yang menjadi substansi permasalahan apakah undang-undang *a quo* ataukah Peraturan Pemerintah yang mengatur kewenangan KPI dimaksud;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bertanggal 28 Juli 2004 Nomor 005/PUU-I/2003, yang menyangkut pengujian Pasal 7 Ayat



(2), Pasal 10 Ayat (1) huruf g, Pasal 14 Ayat (1), Pasal 15 Ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 20, Pasal 21 Ayat (1), Pasal 22 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (2) huruf a, Pasal 27 Ayat (1) huruf a, Pasal 31 Ayat (2), (3), dan (4), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 33 Ayat (4) dan (8), Pasal 34 Ayat (5) huruf a, e, f, Pasal 36 Ayat (2), Pasal 44 Ayat (1), Pasal 47, Pasal 55 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 60 Ayat (3), serta Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran, diajukan oleh 6 (enam) kelompok Pemohon pelaku penyiaran, baik sebagai pengusaha, maupun pekerja di bidang penyiaran;

Menimbang bahwa dalam putusannya Mahkamah telah menyatakan bahwa Pasal 44 Ayat (1) UU Penyiaran untuk bagian anak kalimat, "... *atau terjadi sanggahan*", dan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran untuk bagian anak kalimat, "... *KPI bersama ...*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan Mahkamah atas pernyataan inkonstitusionalitas Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran berbunyi sebagai berikut:

*"Pasal 62 UU Penyiaran menyatakan bahwa kewenangan regulasi KPI bersama Pemerintah tersebut dituangkan dalam bentuk produk hukum Peraturan Pemerintah, padahal berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945, Peraturan Pemerintah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden dalam membuat Peraturan Pemerintah dapat saja memperoleh masukan dari berbagai sumber terkait dengan pokok masalah yang akan diatur, tetapi sumber dimaksud tidak perlu dicantumkan secara eksplisit dalam UU yang memerlukan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaannya. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 62 UU Penyiaran tersebut di atas memang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, seyogianya kewenangan regulasi di bidang penyiaran dikembalikan kepada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Penyiaran yang menyatakan bahwa 'KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran', akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Penyiaran";*

#### **15. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL**

Menimbang bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-I/2003, dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR berpendapat menurut Pasal 60 UU MK seharusnya tidak boleh lagi dilakukan pengujian terhadap materi Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran. Namun, karena adanya Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, permohonan pengujian terhadap materi Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UU Penyiaran menjadi

dimungkinkan untuk diuji kembali. Menurut DPR, melalui ketentuan Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Mahkamah telah memperluas kewenangannya, padahal Pasal 86 UU MK hanya memberi mandat mengatur lebih lanjut hukum acara yang diperlukan dan bukan mengatur hukum materil.

Terhadap pendapat DPR tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tampak jelas, baik dasar dan petitum permohonan yang diajukan dalam Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 adalah berbeda dengan dasar dan petitum pengujian dalam perkara ini. Lagi pula, Pasal 42 Ayat (2) PMK Nomor 06 Tahun 2005 tersebut adalah dalam rangka melengkapi hukum acara sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 86 UU MK yang berbunyi, "*Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini.*" Pasal 42 Ayat (2) PMK Nomor 06 Tahun 2005 tidak dapat dikualifikasikan sebagai hukum materil, karena dibuatnya aturan tersebut, yang dibenarkan menurut Pasal 86 UU MK, adalah untuk memenuhi kebutuhan sebagai akibat terjadinya kekosongan hukum acara yang timbul dari Pasal 60 UU MK. Kekosongan demikian terjadi karena menurut Pasal 60 UU MK, terhadap suatu ketentuan undang-undang yang sudah dimohonkan pengujian tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Padahal, dalam kenyataan acapkali terjadi, suatu ketentuan undang-undang dapat diuji dengan ketentuan pasal yang berbeda dari UUD 1945, sebagaimana yang dijadikan alasan oleh Pemohon. Selain itu, dapat pula terjadi suatu ketentuan undang-undang yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yang dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Mahkamah. Hal demikian juga memerlukan pengaturan hukum acara tersendiri. Sehingga oleh karenanya, jelaslah bahwa pengaturan dalam Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 justru untuk mengisi kekosongan hukum acara yang tidak cukup diatur oleh Pasal 60 yang termasuk dalam Bab V Hukum Acara, Bagian Kedelapan UU MK;

Menimbang bahwa menurut Pemohon, yang didukung oleh Ahli dan Saksi yang diajukannya di persidangan, semangat dan jiwa reformasi yang mendasari UU Penyiaran untuk merespons tuntutan demokrasi dan deregulasi yang menghendaki *leading sector* dalam pengaturan penyiaran – termasuk pemberian izin – diserahkan kepada KPI sebagai sebuah lembaga independen untuk menggantikan dan mengakhiri peran dan dominasi Pemerintah dalam kontrol terhadap penyiaran, dituntut untuk dijadikan dasar menafsir UU Penyiaran. Terhadap pendapat tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa apapun metode penafsiran yang dipilih, titik tolak pertama dalam memahami undang-undang adalah teks undang-undang itu sendiri. Karena, teks undang-undang harus dianggap telah menampung seluruh gagasan dan pemikiran konseptual yang tertuang

dalam kata-kata yang disusun secara sistematis. Apabila dengan membaca teks demikian telah jelas pengertian yang dikandung oleh undang-undang tertentu, maka tidaklah diperlukan penafsiran lain dalam memahamkan arti yang termuat di dalamnya;

Menimbang bahwa *in casu* tentang tafsiran Pemohon yang mendasarkan diri pada semangat reformasi menuju deregulasi dan demokratisasi bidang penyiaran yang memberi peran utama pada KPI sebagai lembaga independen, termasuk perizinan, maka undang-undang yang merupakan hasil kompromi politik yang memuat kesepakatan-kesepakatan bersama, harus dirumuskan dalam teks secara jelas yang menggambarkan kompromi dimaksud, karena pada dasarnya teks undang-undanglah yang merupakan pedoman dalam menjalankan undang-undang tersebut. Jika tafsiran Pasal 33 Ayat (5) tentang pemberian izin penyiaran yang diberikan "oleh Negara melalui KPI", yang menurut Pemohon harus dipahami bahwa izin akan diberikan oleh KPI atas nama Negara dan bukan oleh Pemerintah, Mahkamah tidak sependapat dengan konstruksi pemikiran Pemohon demikian, karena Pasal 1 Angka 13 –yang merumuskan pengertian KPI– dan Pasal 8 Ayat (2) dan (3) –yang mengatur ruang lingkup tugas dan wewenang KPI– sama sekali tidak memasukkan pemberian izin ke dalam ruang lingkup tugas dan wewenang KPI. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat menerima penafsiran yang melihat Pasal 33 Ayat (5) tentang frasa "diberikan oleh Negara melalui KPI", diartikan bahwa izin penyiaran diberikan KPI, karena frasa tersebut juga harus dibaca dan diartikan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang KPI menurut UU Penyiaran *a quo*;

Menimbang bahwa apabila pendirian KPI yang demikian benar merupakan pilihan kebijakan yang menjadi semangat tatkala UU Penyiaran disusun, namun pendirian demikian tidak secara *expressis verbis* termaktub dalam rumusan ketentuan undang-undang *a quo*. Kebijakan yang menyerahkan pemberian izin kepada KPI atas nama negara, ataupun setelah memperoleh rekomendasi dari KPI, Pemerintah mengeluarkan izin, keduanya mungkin secara konstitusional. Akan tetapi pilihan kebijakan harus dengan jelas tertuang dalam teks undang-undang;

Menimbang pula, Pemohon juga menyatakan bahwa independensi KPI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 13 serta Pasal 7 Ayat (2) harus diartikan bahwa KPI-lah sebagai lembaga independen yang mengatur "**hal-hal mengenai penyiaran**", sehingga menjadi tidak independen jika pengaturan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Terhadap pendapat KPI tersebut, Mahkamah perlu mengingatkan Pemohon atas Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-I/2003 yang telah menyatakan bahwa frasa "**KPI bersama**" dalam Pasal 62 Ayat (1) UU Penyiaran bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal dimaksud harus dibaca, "Ketentuan-

ketentuan yang disusun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (10), Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (4), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 33 Ayat (8), Pasal 55 Ayat (3), dan Pasal 60 Ayat (3) **ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.**" Sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah substansi Peraturan Pemerintah dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

Menimbang bahwa dengan uraian ruang lingkup tugas dan wewenang KPI yang demikian, walaupun menimbulkan ketidakpuasan bagi KPI dalam pelaksanaannya, yang menjadi pertanyaan dasar sekarang, apakah berlakunya UU Penyiaran, yang melahirkan dan membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) itu sendiri, merugikan kewenangan KPI tersebut. Anggapan Pemohon bahwa UU Penyiaran, khususnya Pasal 62 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 Ayat (5) merugikan kewenangan konstitusionalnya, tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah karena alasan-alasan berikut ini:

- bahwa Pemohon memperoleh kewenangan sebagai lembaga negara dari UU Penyiaran. Akan tetapi, UU Penyiaran sebagai sumber kewenangan KPI, sekaligus sebagai undang-undang yang membentuk dan melahirkannya tidak mungkin menimbulkan kerugian bagi kewenangannya karena rumusan, ruang lingkup, serta isi wewenang KPI tersebut dirumuskan dalam undang-undang yang membentuk lembaga KPI itu sendiri, sehingga menurut pendapat Mahkamah, KPI sebagai lembaga negara yang merupakan "produk" atau sebagai "anak kandung" undang-undang *a quo*, tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang yang melahirkannya, karena hal itu sama dengan mempersoalkan eksistensi atau keberadaannya sendiri;
- Satu badan atau lembaga yang lahir dan dibentuk dengan satu undang-undang akan menerima eksistensi dan segala wewenang, tugas, dan kewajibannya, dengan segala kelemahan atau kekurangan maupun keuntungan dan kerugiannya, sebagai hal yang melekat dalam dirinya sendiri. Bagaimana mungkin satu undang-undang yang melahirkan satu lembaga dengan segala kewenangan, fungsi, tugas, dan kewajibannya merugikan kewenangan yang diberikan undang-undang itu. Kalaupun ada lembaga negara yang dirugikan kewenangan konstitusionalnya dalam pengertian Pasal 51 Ayat (1) UU MK, maka lembaga negara dimaksud adalah lembaga negara lain, bukan lembaga negara yang dilahirkan oleh undang-undang *a quo*. Di samping lembaga negara, perorangan atau badan hukum privat/publik juga diberi kedudukan hukum untuk menguji undang-undang jikalau undang-undang tersebut merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945. Akan tetapi Pemohon sebagai lembaga negara yang mendasarkan pada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 tidaklah tepat. Pasal tersebut berbunyi, "Setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, sehingga jelas bahwa yang menjadi subjek hukum dalam pasal ini adalah orang dalam pengertian orang pribadi (*natuurlijke persoon*). Seandainya pun hak asasi demikian dapat ditafsirkan berlaku untuk badan hukum (*rechtspersoon*) hal itu juga tidak berlaku bagi Pemohon bukan saja karena Pemohon mendalilkan dirinya sebagai lembaga negara tetapi juga karena tidak semua hak konstitusional yang dimiliki oleh orang pribadi serta merta berlaku pula bagi badan hukum;

- KPI sebagai lembaga negara yang merupakan “produk” dari UU Penyiaran yang melahirkannya, tidak akan pernah dirugikan oleh UU Penyiaran itu sendiri, dengan tafsiran apapun yang akan dipakai atas Pasal 51 UU MK atas kerugian kewenangan konstitusional satu lembaga negara. Karena, dengan kelahiran eksistensi dan kewenangan-kewenangannya, KPI (Pemohon) semata-mata merupakan pihak yang diuntungkan (*beneficiary*), terlepas dari kemungkinan adanya penilaian oleh sementara kalangan bahwa rumusan kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang *a quo* kabur atau terdapat pertentangan dalam dirinya sendiri (*self-contradictory*);

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah tidak menafikan keadaan bahwa UU Penyiaran merupakan satu hasil kompromi politik, dan kompromi demikian tidaklah dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi, tetapi *legal standing* untuk mempersoalkan undang-undang yang melahirkan lembaga tertentu, tidak berada pada lembaga yang lahir dari undang-undang yang diuji. Dengan kata lain, walaupun benar ada *-quod non-* kekaburan atau terdapatnya pertentangan dalam diri undang-undang tersebut (*self-contradictory*) sehingga tidak sesuai dengan semangat dan cita-cita yang mendorong kelahirannya, hal itu tidaklah dapat dijadikan alasan oleh lembaga negara yang dilahirkan oleh suatu undang-undang untuk mengajukan permohonan pengujian atas undang-undang yang melahirkannya. Hal demikian terpulang kepada pembuat undang-undang untuk menegaskan kebijakan yang dipilihnya;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa berlakunya UU Penyiaran tidak menimbulkan kerugian hak atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam pengertian Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Oleh karenanya, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Sebelum diteruskan kembali ke halaman 114 alinea tiga bahwa DPR RI, dalam keterangan tertulisnya tanggal 22 Februari 2007, telah menyatakan ketentuan Pasal 42 Ayat (2) tersebutnya diganti PMK Nomor 06/PMK/2005 dan seterusnya, kembali ke 138.

Mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2003 Nomor 98, TLN RI Nomor 4316);

### **MENGADILI**

**Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Senin, 16 April 2007, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 17 April 2007, yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, H.M.Laica Marzuki, H. Achmad Roestandi, H.A.S. Natabaya, H. Abdul Mukthie Fadjar, H. Harjono, I Dewa Gede Palguna, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Tidak Langsung Indonesia Media Law and Policy Centre;

Demikian ditandatangani oleh sembilan hakim konstitusi dan panitera pengganti dan dengan demikian putusan ini resmi telah dibacakan atau diucapkan. Dan dengan demikian pula sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk hari ini pembacaan dua putusan saya nyatakan ditutup.

*Assalamu'alaikum wr wb.*

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB**